

## **Penguatan Nasionalisme Milenial Dalam Politik Melalui Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia**

Inggar Saputra  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jakarta  
inggarsaputra88@gmail.com

Firdaus  
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia  
dazzudazzle@gmail.com

**Abstrak:** Menjelang tahun 2024 yang sering disebut tahun politik, suasana perpolitikan Indonesia diyakini akan memanas. Ujaran kebencian, berita bohong, politik identitas dan politik uang adalah ancaman dalam melahirkan pemilihan umum yang berintegritas. Untuk mencapai kemenangan politisi berpotensi memanfaatkan segala cara untuk merebut suara pemilih termasuk kalangan pemilih muda atau milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000-an. Mereka memiliki ciri kreatif, terhubung dengan media sosial dan memiliki kepercayaan diri tinggi. Jika potensi destruktif akibat pertarungan politik melanda kematangan emosional mereka yang labil, tentu berdampak buruk terhadap pengabaian moralitas, etika dan nilai kesantunan dalam kehidupan milenial. Untuk itu, dibutuhkan kader sekolah penggerak partisipatif untuk menguatkan nasionalisme dan membentuk milenial cerdas, kritis dan aktif dalam menghadapi turbulensi politik di era *post truth* (paska kebenaran) dalam pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana sekolah kader penggerak partisipatif mampu memberikan pemahaman kepada peserta tentang situasi demokrasi, politik nasional dan bagaimana penguatan nasionalisme yang tepat dalam menghadapi kondisi politik yang berkembang. Penguatan nasionalisme khususnya segi pendidikan karakter melalui nilai moralitas, etika dan kesantunan berpolitik baik tindakan secara fisik dan pemanfaatan media sosial dalam mendukung hal tersebut. Kesimpulan penelitian adalah sekolah kader penggerak partisipatif dapat membentuk pemahaman dasar pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap potensi ancaman destruktif dalam pemilu 2024.

**Kata Kunci:** nasionalisme; milenial; politik; partisipatif

**Abstract:** As the year 2024 approaches, which is often referred to as the political year, the atmosphere of Indonesian politics is believed to be heating up. Hate speech, fake news, identity politics and money politics are threats in giving birth to elections with integrity. To achieve victory, politicians have the potential to utilize all means to win voters, including young or millennial voters. Generation Millennials are the generation born between 1980 and 2000. They are characterized as creative, connected to social media and have high self-confidence. If the destructive potential of political battles hit their unstable emotional maturity, it will certainly have a negative impact on the neglect of morality, ethics and to the neglect of morality, ethics and the value of civility in millennial life. For this reason, participatory activist school cadres are needed to strengthen nationalism and form millennials. Strengthening nationalism and form smart, critical and active millennials in facing political turbulence in the era of political in facing political turbulence in the post truth era in the 2024 elections in the 2024 election. This research uses a qualitative research method from literature studies. Data collection techniques using literature studies, observation and documentation. The result of the research explained how the participatory activist cadre school was able to provide participants with an understanding of the situation of democracy, national politics national politics and how to strengthen nationalism that is appropriate in facing the developing political conditions. Strengthening nationalism especially in terms of character education through the values of morality, ethics and political civility, both physical actions and the use of both physical actions and

*utilization of social media in supporting this. Social media utilization in supporting this. The conclusion of the research is participatory activist cadre schools can form a basic understanding of supervision and preventive action against potential destructive threats in the 2024 elections.*

**Keywords:** *nationalism; millennial; politics; participatory*

## **PENDAHULUAN**

Perhelatan pemilihan umum tahun 2024 untuk memilih pemimpin eksekutif dan anggota legislatif semakin mendekat dalam hitungan bulan. Setiap partai politik mulai menjalin komunikasi secara intensif untuk membentuk koalisi demi menjamin terpenuhinya kuota untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, partai politik juga mulai menyusun daftar calon anggota legislatif untuk mewakili aspirasi rakyat dan kepentingan politik masing-masing partai politik. Berbagai kerja politik menjelang pemilihan umum menjadi pertanda demokrasi Indonesia memberikan ruang kepada warga negara untuk ikut berpartisipasi aktif memilih pejabat publik (Amir, 2020) Mendekati pemilu yang menghitung bulan kita sekarang semakin mudah melihat wajah calon pemimpin Indonesia lima tahun mendatang muncul di sepanjang jalan kota dan desa. Melalui media luar ruang dan media sosial, mereka ingin menampilkan diri sebagai sosok yang dianggap representatif dan berhak mewakili suaranya. Hal ini tentu saja sebuah kewajaran yang legal dan mendukung kehidupan positif demokrasi di Indonesia.

Keinginan menampilkan diri untuk dikenal masyarakat merupakan sebuah strategi *marketing* dan *branding* politik dalam memenangkan ajang pemilihan legislatif dan eksekutif. Para calon pemimpin bangsa mengemas dirinya dengan berbagai tampilan menarik dan isu populer yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk mencoblos dirinya di kotak suaranya. Media luar ruang seperti baliho dan *billboard* masih marak dan menjadi pilihan utama untuk mempromosikan diri dan agenda politik kandidat untuk berkomunikasi di ruang publik (Khatami, 2021) Selain menyapa masyarakat pemilih atau konstituen melalui sosialisasi secara langsung, para calon pemimpin bangsa berusaha menyapa masyarakat melalui berbagai kegiatan baik bantuan sosial, seminar, pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya. Tak ketinggalan mereka memanfaatkan media sosial untuk merebut suara pemilih dunia maya atau netizen khususnya kalangan pemilih pemula yang menyenangkan dan aktif dalam bermediasosial.

Di era teknologi khususnya media sosial yang berkembang cepat, perbincangan politik pemilihan umum 2024 semakin menjadi konsumsi masyarakat luas. Akses informasi politik yang terbuka, massif dan intensif membuka ruang dinamika dan perdebatan dalam berbagai platform media sosial yang melibatkan kelompok masyarakat atau komunitas sosial. Mereka secara rasional dan irrasional terkonstruksi atas berbagai informasi politik yang menjamur (Zaman & Misnan, 2021) Di media sosial, efek tahun politik sangat dirasakan dimana berkembang banyak sekali informasi yang mengarah kepada ujaran kebencian, berita bohong dan propaganda antar kandidat yang bertujuan menjatuhkan lawan politiknya. Ancaman politik identitas dan politik uang juga mengancam integritas pemilihan umum sebagai mekanisme politik formal untuk menyeleksi, memilih dan mengganti pejabat publik.

Beredarnya informasi yang bohong, penuh kebencian dan menyesatkan publik tidak terlepas dari fenomena post truth atau paska kebenaran. Ditengah informasi media sosial yang deras, kita dihadapkan karakter pemilih yang mengedepankan emosional dibandingkan

rasionalitas dan fakta (Diniyanto & Sutrisno, 2022). Mereka meyakini satu referensi tanpamemperdulikan kebenaran dan kebohongan atas informasi politik yang diperoleh. Tanpa kemampuan menyeleksi informasi dan rendahnya literasidigital menyebabkan berita bohong dan ujaran kebencian mudah berkembang (Gunawan & Ratmono, 2021)

Kehidupan demokrasi di era post truth setidaknya menghasilkan tiga tantangan serius. Pertama, besarnya pengguna internet khususnya media sosial di Indonesia setelah Cina dan India. Kedua, potensi intervensi negara lain melalui potensi peretasan media digital. Ketiga, pembelahan masyarakat akibat pemilu yang menciptakan perdebatan panjang kelompokpro dan kontra pemimpin terpilih. Situasi ini harus diantisipasi sebab jika dibiarkan, maka berpotensi mengubah pemilihan umum menjadi sarana disintegrasi bangsa dan menghasilkan demokrasi yang cacat, menurunkan kualitas demokrasi dan mencederai integritas pemilu (Diniyanto & Sutrisno, 2022).

Tidak ketinggalan menyebut politik uang sebagai salah satu problematika yang mendorong tingkat demokrasi Indonesia semakin mahal dan kehilangan substansinya. Kekuatan finansial sebagai salah satu sumber daya dalam politik dijadikan pijakan bagi calon pemimpin untuk memenangkan kompetisi politik dengan meminggirkan kejujuran dan moralitas sebagai bagian dari etika politik. Dalam perkembangan belakangan ini, politik uang semakin berkembang dan mengalami pergeseran orientasi di masyarakat. Jika sebelumnya aktor politik memberikan uang kepada pemilih, sekarang aktor politik beralih memberikan uang kepada penyelenggara pemilu. Kondisi bertambah rumit ketika masyarakat menilai politik uang sebagai sesuatu yang wajar, selain persoalan regulasi yang masih lemah dan minimnya sanksi sosial bagi pelaku politik uang sehingga belum mampu menghadirkan efek jera di masyarakat (dkpp.go.id, 2023)

Politik identitas sebenarnya sudah mengemuka satu dekade terakhir sebagai wacana elektoral sehingga memicu perdebatan antara kelompok politik nasionalis dan Islam radikal. Berkaca pemilihan umum 2019 masyarakat Indonesia mengalami ketegangan sosial yang kronis dan berkepanjangan sebagai dampak penggunaan isu keagamaan dan kesukuan dari para kandidat yang berkontestasi (Sujito, 2022) Ini membuat keharmonisan hidup dan kesadaran masyarakat Indonesia yang multikultural mengalami polarisasi politik yang tidak berkesudahan. Mendekati pemilu 2024, ancaman terulangnya politik identitas menjadi salah satu tantangan berat dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan pemilihan umum yang berintegritas.

Di tengah tantangan terhadap pemilihan umum yang berintegritas, kita dihadapkan pada kelompok pemilih yang beragam. Salah satunya generasi milenial yaitu kelompok usia produktif yang lahir tahun 1980 hingga 2000 sehingga rentang usia mereka 16 hingga 37 tahun (Nindyati, 2017) Generasi milenial sebagai kelas menengah urban dicirikan memiliki kepercayaan diritinggi, mampu bersosialisasi dengan baik, aktif berkomunikasi melalui sosial media dan internet, serta mampu berfikir dan bertindak kreatif (Ali et.al, 2017)

Generasi milenial sangat dekat dan banyak dicukupi kebutuhan informasi melalui sarana teknologi. Mereka secara aktif melakukan kampanye politik, pengembangan intelektual dan aktif bertukar informasi. Secara politik, angka pemilih milenial cukup tinggi dimana tahun 2019 menurut data Komisi Pemilihan Umum tercatat pemilih milenial mencapai 60 juta orang (31 persen). Tetapi besarnya jumlah pemilih milenial tidak membuat mereka memiliki loyalitas dan komitmen politik yang baik. Banyak milenial lebih menyukai aktivitas relawan politik dan

aktivis media sosial dibandingkan aktif berkampanye politik secara konvensional, ikut menjadi anggota partai politik dan memilih dalam pemilihan umum. (Juditha & Darmawan, 2018)

Bagi kalangan politisi baik calon presiden dan anggota legislatif, besarnya pemilih milenial menjadikan mereka target atau sasaran untuk aktif sebagai penyumbang suara dalam kompetisi politik pemilihan umum 2024. Upaya menarik suara milenial banyak dilakukan melalui media sosial sebagai ruang pertemuan virtual dan berekspresi generasi milenial. Di tengah kondisi emosional generasi milenial yang labil, sulit dipungkiri cara bertentangan dengan nilai kejujuran seringkali ditempuh aktor politik. Mereka mencoba menarik suara milenial untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, terjebak dalam politik identitas dan politik uang. Meski tidak selamanya menuai keberhasilan karena sikap kritis dan perilaku cuek kepada politik, realitasnya di era post truth tidak sedikit generasi milenial ikut masuk dalam pusaran propaganda penuh kebohongan dan permusuhan tersebut.

Menyadari realitas yang berkembang, Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas pemilihan umum nasional dan daerah mendorong partisipasi politik masyarakat termasuk segmen kelompok pemilih milenial. Dengan semangat membentuk pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu yang berintegritas, terbentuklah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Badan Pengawas Pemilu menyediakan layanan pendidikan dan pusat pendidikan pengawasan pemilihan umum, sementara generasi milenial atau pemilih pemula berpartisipasi sebagai aktor atau kader yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan pemilu. Selama pelatihan, para kader pengawas partisipatif diberikan materi pendidikan karakter, demokrasi dan kepemiluan serta kecakapan dasar pengawas partisipatif. (Hafidz, et. Al, 2020)

Tentu muncul harapan adanya sekolah kader pengawas partisipasi dapat dimaknai sebagai edukasi dan tindakan pencegahan terhadap proses destruktif yang berpotensi mengganggu kelancaran dan mencederai pemilihan umum yang berintegritas. Melalui sekolah ini, generasi milenial sebagai pemilih pemula diajak memahami pentingnya berdemokrasi secara sehat dan *fair*, memiliki kesadaran pengembangan karakter (integritas diri, etos kerelawanan, dan peduli terhadap kelompok rentan) dan penguatan nilai nasionalisme melalui partisipasi aktif generasi milenial menyukseskan regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia. Nasionalisme yang dibangun bagaimana di era digital, generasi milenial dapat ikut berkontribusi memberikan edukasi yang mencerahkan dan berperan aktif mencegah tindakan yang bertentangan dengan etika, moralitas dan kesusilaan khususnya yang terjadi di media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan analisis pendekatan induktif yang mengedepankan proses dan perspektif subjek. Landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian selaras dengan fakta di lapangan (Cresswell, 2016) Peneliti melakukan studi pustaka untuk menganalisis data sekunder dengan mengelaborasi bahan kepustakaan primer dan sekunder. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dengan pengumpulan data pustaka, lalu membaca serta mencatat dan mengolah bahan penelitian. Penulis nantinya akan mencari referensi teori yang sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Dalam penelusuran literatur, artikel atau jurnal yang sesuai dengan kriteria

inklusi dan eksklusi diambil untuk selanjutnya dianalisis secara kritis dan mendalam melalui pengumpulan sejumlah buku, dokumen, majalah, dan sejarah yang terkait dengan masalah serta tujuan penulis (Sari & Asmendri, 2018). Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengorganisasian data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari dan memutuskan apa yang menjadi temuan dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan umum 2024 merupakan sebuah proses regenerasi kepemimpinan politik yang dinanti seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kontestasi politik masyarakat akan memilih calon pemimpin Indonesia lima tahun mendatang. Para pemilih adalah kelompok warga negara yang melek politik, memiliki keinginan berpartisipasi secara aktif dalam politik dan sadar atas pilihan rasional yang menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Untuk itu, setiap pemilih diharapkan mampu secara rasional menentukan pilihan politiknya sebagai wujud tanggung jawab nasionalisme, peran warga negara terhadap kemajuan negara dan mendorong kepemimpinan nasional yang demokratis dan berkualitas.

Merespons momentum politik ini, kita menghadapi situasi yang tidak mudah akibat perkembangan kondisi sosial politik yang dinamis dan pengaruh teknologi informasi yang berkembang cepat. Kita sekarang hidup di era post truth yang didefinisikan sebagai zaman dimana terjadi distorsi pengetahuan dan informasi, sehingga aspek emosional lebih dikedepankan daripada nalar logis, sistemik dan ilmiah. Kebenaran sebuah informasi bercampur kebohongan sehingga keakuratan informasi dipertanyakan yang berujung kepada produksi dan penyebaran kebohongan seolah sebagai kebenaran (Harsin, 2018; Hyoven, 2018)

Post Truth adalah kondisi dimana keyakinan emosional dan preferensi personal lebih dominan dibandingkan rasionalitas dan fakta dalam pembentukan opini publik. Dalam era post truth, informasi hilir mudik secara cepat sehingga kita kesulitan mengklarifikasi dan memverifikasi pemberitaan maupun informasi yang diterima. Akibatnya informasi yang diterima diserap menjadi asumsi personal dan keyakinan yang subjektif sehingga muncul pemaksaan atas kebenaran yang diyakini kepada orang lain (Amilin, 2019)

Dalam perspektif penulis, setidaknya ada empat tantangan dalam mendorong pemilihan umum yang berintegritas dan kehidupan demokrasi yang berkualitas di tengah ancaman era post truth. Pertama, maraknya ujaran kebencian sebagai efek dari era paska kebenaran yang mengutamakan keyakinan dan sikap politik yang bersifat emosional sehingga meminggirkan rasionalitas dan basis fakta. Ujaran kebencian dipahami sebagai tindakan menghasut, mempromosikan, dan membenarkan kebencian secara ekspresi dan tertulis yang menciptakan intoleransi atas dasar agama (Palmadottir & Kalenikova, 2018) Ujaran kebencian disebarkan sebagai strategi pemenangan politik dengan memanfaatkan media sosial melalui penciptaan informasi yang salah dan menimbulkan prasangka buruk (Bank, 2010)

Kedua, propaganda media sosial melalui penyebaran berita bohong (hoaks) untuk mengangkat citra seorang kandidat dan menjatuhkan lawan politiknya. Hoaks adalah informasi yang tidak benar tetapi seolah dianggap mengandung kebenaran (Ireton & Posetti, 2018) Hoaks disebarkan melalui platform media sosial untuk menjatuhkan lawan politik sehingga menjadi

ancaman serius bagi partisipasi warga di negara demokrasi (Utami, 2018). Hoaks dianggap benar karena rendahnya literasi digital, minimnya informasi yang diperoleh dan ketidakmampuan seorang individu dalam membudayakan memilih dan memilah sebuah informasi.

Ketiga, penggunaan politik identitas untuk menyentuh emosionalitas pemilih dan meminggirkan rasionalitas berdasarkan wacana sensitif dimasyarakat seperti isu keagamaan dan kesukuan. Politik identitas adalah politik dengan memprioritaskan kepentingan anggota kelompok berdasarkan kesamaan identitas ras, etnisitas dan keagamaan (Lukmantoro, 2008) Politik identitas dipakai untuk mendapatkan suara pemilih secara eksklusif-transaksional dengan membenturkan agama dan negara. Kondisi ini sangat membahayakan demokrasi Indonesia karena menciptakan instabilitas sosial, politik dan keamanan, serta mengarah kepada disintegrasi bangsa

Terakhir, politik uang sebagai bentuk politik transaksional sehingga membuat ongkos demokrasi semakin mahal dan pemilih mengalami irasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya. Politik uang sebenarnya lahir atas dasar belum terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka tergiur menukar pilihan suara dalam pemilihan umum dengan sejumlah uang. Tetapi belakangan fenomena politik uang mulai bergeser dari aktor politik ke pemilih menjadi aktor politik kepada penyelenggara pemilu. Maraknya politik uang tentu sangat berbahaya karena melahirkan pemimpin bermental koruptor dan mencederai semangat pemilihan umum yang berintegritas dengan mengedepankan spirit kejujuran dan keadilan.

Dalam mencegah berbagai kompleksitas persoalan yang mengganggu integritas pemilu, Badan Pengawas Pemilu berinisiatif melakukan pergeseran orientasi pengawasan pemilu. Dari sebelumnya penemuan pelanggaran menjadi pencegahan pelanggaran. Hal ini dipandang efektif agar ada sinergitas pengawas pemilihan umum dengan masyarakat melalui skema pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah usaha mengawasi pemilihan umum baik masa kampanye, masa tenang dan hari pencoblosan. Kegiatan yang dilakukan meliputi memantau pelaksanaan pemilihan umum, melaporkan pelanggaran pemilihan umum, menyampaikan dugaan pelanggaran pemilihan umum dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum (Hafidz et al, 2020)

Pengawasan partisipatif menjadi bentuk kolaborasi baru dari lembaga pengawas pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas termasuk kalangan generasi milenial. Pilihan kepada anak muda disebabkan tren pelanggaran pemilihan umum 2024 banyak terjadi di media sosial. Apalagi kita memasuki era post truth, dimana keyakinan pemilih cenderung emosional dibandingkan mengedepankan rasionalitas. Pemilih sangat rentan mengalami isu yang provokatif, maraknya berita bohong, menebarkan kebencian dengan dalih keagamaan dan memakai sarana politik identitas. Potensi terhadap bentuk pelanggaran pemilihan umum melalui sarana media sosial sangat tepat jika diawasi generasi milenial. Sebab generasi milenial cenderung non-partisipan dalam pilihan politiknya, menyukai gerakan kerelawanan sosial media dan aktif memakai serta menyebarkan postingan positif terutama yang melibatkan komunitasnya.

Melalui sekolah kader penggerak partisipatif, generasi milenial akan mendapatkan penguatan nasionalisme di bidang politik khususnya bagaimana aktif dalam menyukseskan pesta demokrasi 2024. Materi dalam sekolah kader penggerak partisipatif sangat komprehensif

seperti pengembangan karakter generasi milenial melalui integritas diri (etika, moralitas dan gerakan volunterisme). demokrasi dan kepemiluan (dasar-dasar demokrasi, partai politik dan sistem kepartaian, serta lembaga penyelenggara pemilu) dan kecakapan dasar pengawas partisipatif (membangun perspektif partisipasi pengawasan pemilu, prosedur pengawasan dan pelaporan, serta kecakapan digital pengawasan partisipatif)

Pemberian layanan pendidikan melalui pengetahuan dan praktek terhadap pengawasan pemilihan umum menjadi sangat penting dalam menyikapi dinamika mendekati pemilihan umum 2024 yang semakin memanas. Pembentukan koalisi partai, dukungan partai politik terhadap calon presiden tertentu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan berbagai isu politik lainnya terus bermunculan. Apalagi jika melibatkan media sosial yang mudah diakses secara terbuka oleh masyarakat luas, maka gejolak sosial dan kegaduhan di masyarakat akan mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat. Ini semua harus disikapi secara bijaksana, melibatkan pengawasan dari kelompok masyarakat dan penguatan secara regulasi dan sanksi hukum sehingga potensi pelanggaran pemilihan umum dapat diminimalisir.

Kegiatan sekolah kader penggerak partisipatif merupakan ikhtiar pengawas pemilu dalam menguatkan nasionalisme politik generasi muda. Kita mengetahui bagaimana nasionalisme mengalami disrupsi dengan maraknya platform media sosial. Jika dulu dimaknai nasionalisme sebagai perasaan kecintaan kepada bangsa dan negara dalam bentuk revolusi fisik. Sekarang generasi milenial memaknai perjuangan menggelorakan nasionalisme melalui partisipasi politik dengan memanfaatkan media sosial dan mendukung gerakan kerelawanan politik. Pengawasan pemilihan umum menjadi corak baru ekspresi anak muda dengan memantau dan mengawasi pemilihan umum 2024 melalui gerakan kader partisipatif.

## **KESIMPULAN**

Pemilihan umum 2024 semakin dekat dan ancaman terhadap integritas pemilihan umum muncul secara nyata. Adanya era post truth menghadirkan ujaran kebencian, berita bohong, politik identitas dan politik uang. Problematika ini mengganggu proses suksesi kepemimpinan melalui mekanisme formal pemilihan umum. Tantangan yang ada berpotensi menggeser pemilu kehilangan integritasnya dan menciptakan disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat dan komunitas sosial. Sekolah kader penggerak partisipatif hadir menjembatani persoalan yang ada agar dapat terselesaikan dengan baik. Melalui pelibatan kelompok masyarakat termasuk generasi milenial diharapkan pengawasan dan pemantauan pemilihan umum 2024 dapat lebih maksimal dan efektif. Dengan pemberian materi yang mencakup pengembangan karakter, pemahaman dasar kepemiluan dan demokrasi, serta kecakapan pengawasan partisipatif diharapkan nasionalisme generasi milenial mengalami penguatan khususnya di bidang politik. Diharapkan sekolah kader penggerak partisipatif dapat membentuk pemahaman dasar pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap potensi ancaman destruktif dalam pemilihan umum 2024.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Shintadewi, E.A & Sumartias S. (2017). Promosi Kesehatan HIV-AIDS dan Stigma Terhadap Pengguna Narkoba Suntik (Penasun) di Kabupaten Sumedang. *Sosiohumaniora*, 19 (2): 129-140.

**Inggar Saputra dan Firdaus, Penguatan Nasionalisme Milenial Dalam Politik : Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia**

- Ali, et. Al. (2017). *The Urban Middle Class Millenials Indonesia: Financialand Online Behaviour*. Laporan Hasil Penelitian. Jakarta: Alvara ResearchCenter.
- Amilin. Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas*. Edisi 39. September 2019. 5-11
- Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*. 23(2), 115-132
- Bank, J. (2010). Regulating Hate Speech Online. *International Review of Law, Computer & Technology*, 24(3), 233-239
- Cresswell, J., W, (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W., (2022). Pengawasan Pemilihan Umum Di Era Post Truth: Problem, Tantangan dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. 5(1), 44-58
- DKPP. 2023. Ratna Dewi: Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024. Dikutip dari <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/>
- Gunawan, B., & Ratmono, B.M. (2021). *Demokrasi DI Era Post Truth*. (C.Gautama & Y. Wihartono, eds), Jakarta : Gramedia
- Hafidz, Masykurudin. (2020). *Modul Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Dasar*. Jakarta : Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Harsin, Jayson. (2018). Post Truth and Critical Communication Studies. *Oxford Research Encyclopedia of Communication*.
- Hyvnen, A., E. (2018). Careless Speech: Conceptualizing Post-Truth Politic. *Sage Journals*, 26(3), 31-56
- Ireton, C., & Posetti, J. (2018). *Journalism, Fake News & Disinformation: Handbook For Journalism Education and Training*. UNESCO Publishing.
- Juditha. C., & Darmawan. J. (2018). Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. 22(2), 104-109.
- Khatami, M., I. (2021). Eksistensi Baliho 2024 Dalam Pertarungan Elektabilitas : Analisis Pencitraan Tokoh Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*. 5(2), 14-24
- Nindyati, A., D. (2017). Pemaknaan Loyalitas Karyawan Pada Generasi X dan Generasi Y (Studi Pada Karyawan di Indonesia). *Journal of Psychological Science and Profession*. 1(3), 59-66
- Palmadottir, J. A., & Kalenikova, I. (2018). *Hate Spech: An Overview And Recommendations For Combating It*. Iceland Human Right Center.
- Sudjito, A., (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila*. 3(2), 13-32.
- Triyono, Lukmantoro. (2008). *Kematian Politik Ruang*. Jakarta: Kompas
- Utami, P. (2018). Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesia Politics and Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 2018.
- Zaman, R. K., & Misnan. (2021). Infrastruktur Politik Menuju Pilpres 2024 Dalam Konstruksi Media Sosial. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*. 4(1), 41-53
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 2(1), 41 - 53